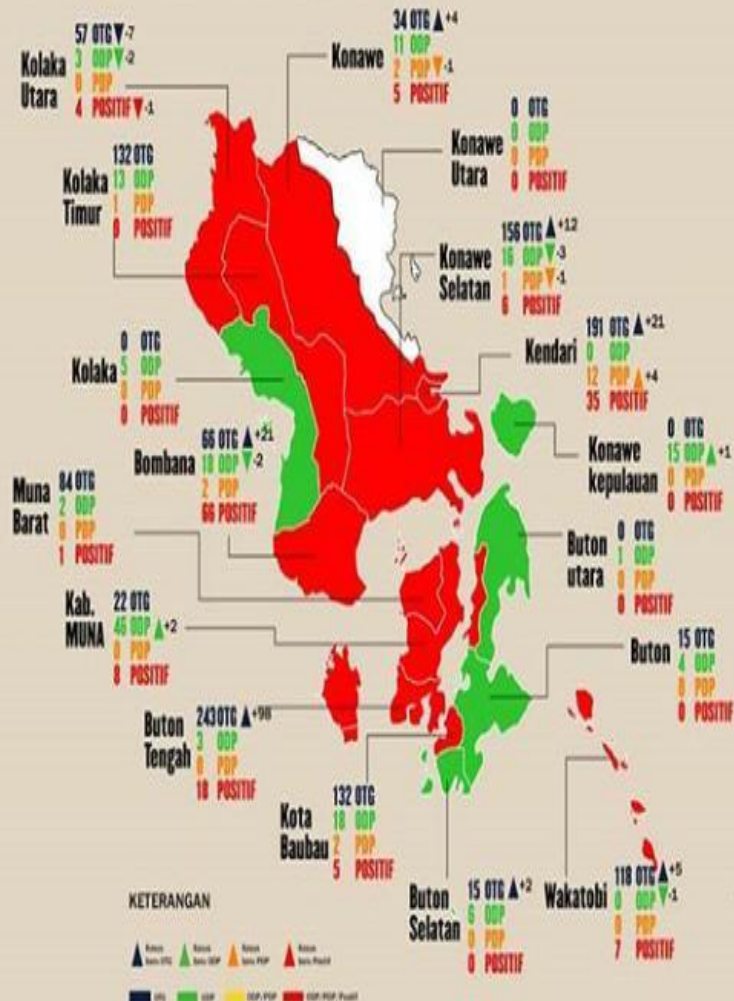




UPDATE DATA PERKEMBANGAN
COVID-19
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



SENIN, 18 MEI 2020
JAM, 17:00 WITA



DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PROF. DR. MUHAMMAD SYARIF, SE., MS
KETUA ISEI CABANG KENDARI
RABU, 20 MEI 2020

Disampaikan dalam Dialog Online ISEI Cabang Wilayah Timur Tema "Kasus Covid-19; Dampak Sosial Ekonomi dan Kebijakan Penanganannya di Daerah Kendari, 20 Mei 2020

Kebijakan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tenggara relatif sama dengan di daerah lain, yaitu:

Menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat tentang penetapan Indonesia dalam Tanggap Darurat. Pada tanggal 15 Maret 2020 pemerintah Provinsi mengeluarkan SK No. 183 Tahun 2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- a. Segera melakukan identifikasi dan pemantauan jalur masuk ke Sulawesi Tenggara melalui Darat, Laut, dan Udara.**
- b. Melakukan koordinasi dengan seluruh Kab/Kota terkait Covid-19.**
- c. Menetapkan Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sultra sebagai Posko Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Covid-19.**
- d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan BNPB RI terkait Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Covid-19.**
- e. Penyebaran informasi tentang Covid-19 kepada lapisan masyarakat.**
- f. Melibatkan sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA sampai perguruan Tinggi.**
- g. Menyiapkan personil Medis Khusus penanganan Covid-19, dan penyiapan logistik medis.**

PERKEMBANGAN COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BLN/TGL	MARET		A P R I L												
	17	19	3	5	8	9	11	15	16	18	19	24	26	29	30
OTG			27	31	67	81	81	95	95	101	99	373	377	381	443
ODP	172		923	737	521	477	395	329	330	282	279	282	261	256	252
PDP	9		15	14	13	12	19	14	13	14	14	14	11	13	13
POSITIF		3	4	5	9	14	14	19	22	21	30	34	37	45	49
SEMBUH		0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	5	6	6	11
MENINGGAL		0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

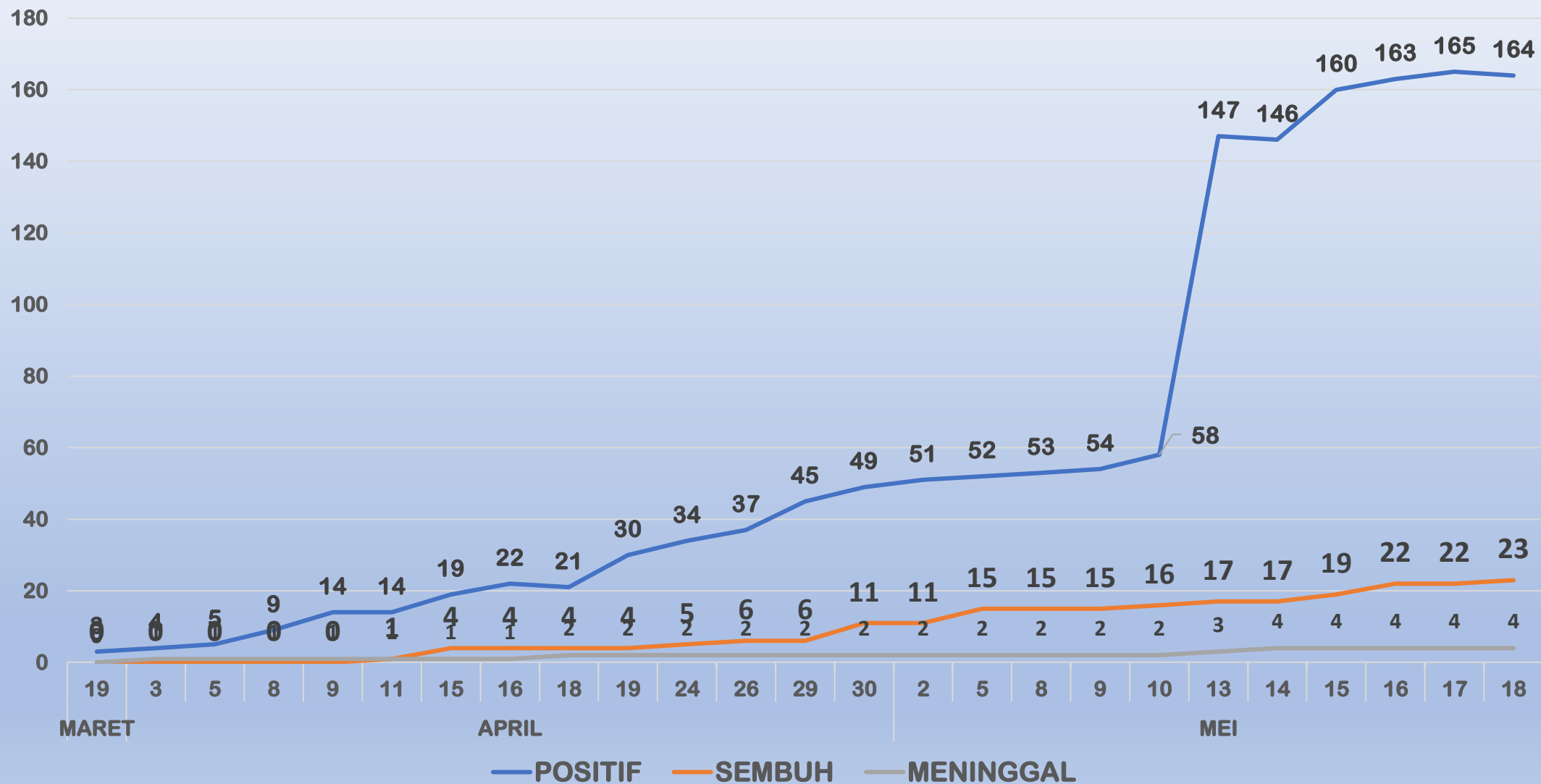
Sumber: Posko Gugus Tugas Covid-19 Prov. Sultra.

PERKEMBANGAN COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BLN/TGL	M E I										
URAIAN	2	5	8	9	10	13	14	15	16	17	18
OTG	724	809	892	903	906	906	970	1063	1097	1109	1265
ODP	246	217	195	197	191	171	175	174	166	166	161
PDP	12	12	17	17	22	18	17	21	22	18	161
POSITIF	51	52	53	54	58	147	146	160	163	165	164
SEMBUH	11	15	15	15	16	17	17	19	22	22	23
MENINGGAL	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	5

Sumber: Posko Gugus Tugas Covid-19 Prov. Sultra.

PERKEMBANGAN COVID-19 DI SULTRA

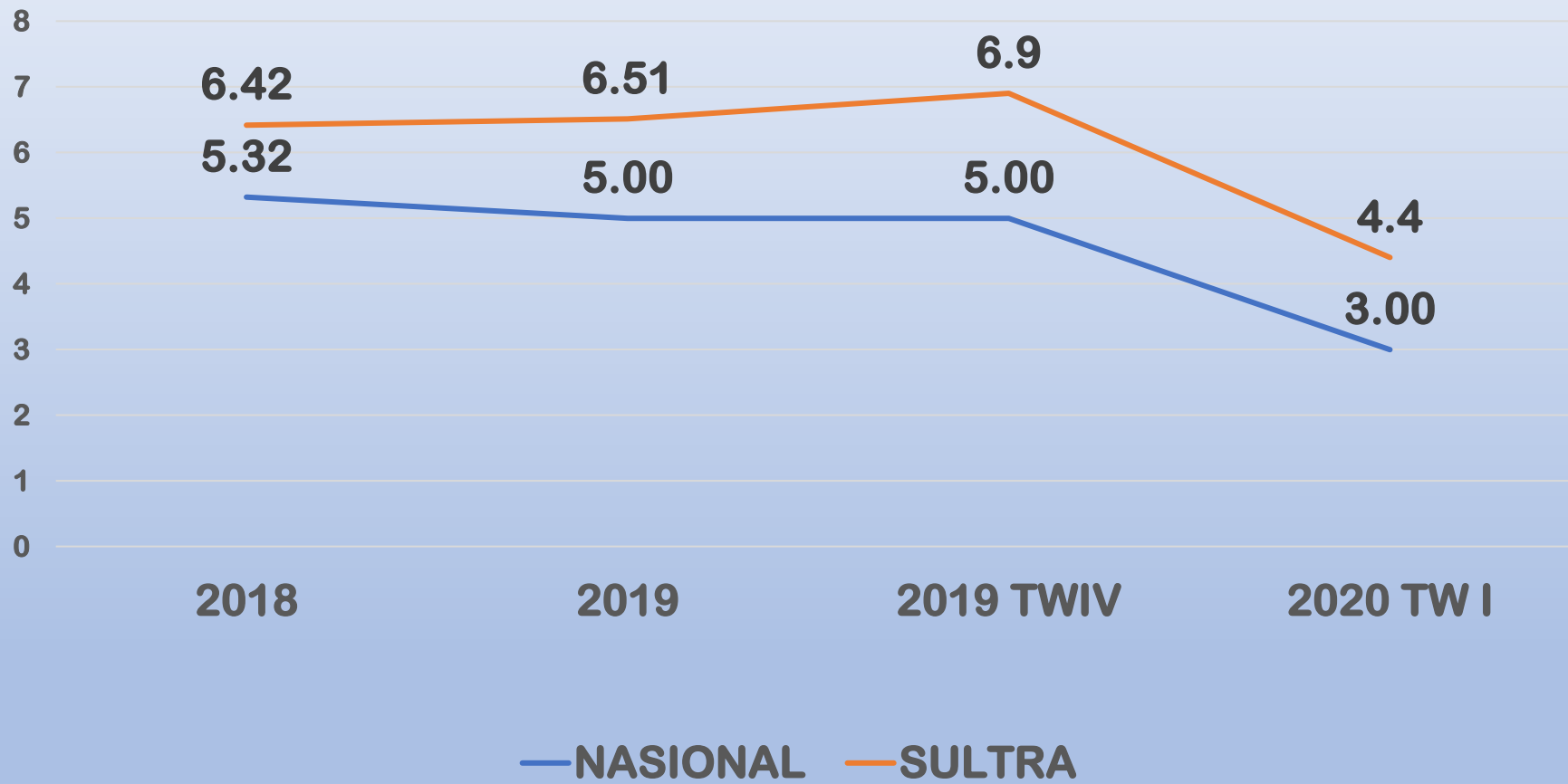


**PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDUDUK MISKIN,
DAN PENGANGGURAN TAHUN 2013-2020**

NO	TAHUN	PERT. EKONOMI		PENDUDUK MISKIN		PENGANGGURAN	
		SULTRA	INDONESIA	SULTRA	INDONESIA	SULTRA	INDONESIA
1	2013	7,50	5,71	13,73	11,46	4,46	6,17
2	2014	6,25	5,21	12,77	10,96	4,43	5,94
3	2015	6,88	4,99	13,74	11,13	5,55	6,18
4	2016	6,51	5,16	12,88	10,86	2,72	5,61
5	2017	6,81	5,23	12,81	10,64	3,30	5,50
6	2018	6,42	5,31	11,63	9,82	3,26	5,34
7	2019	6,51	5,00	11,24	9,29	3,59	5,01
8	2020	4,4	3,00	-	-	3,17	4,99

Sumber : BPS Indonesia, Sultra Dalam Angka 2017, 2020

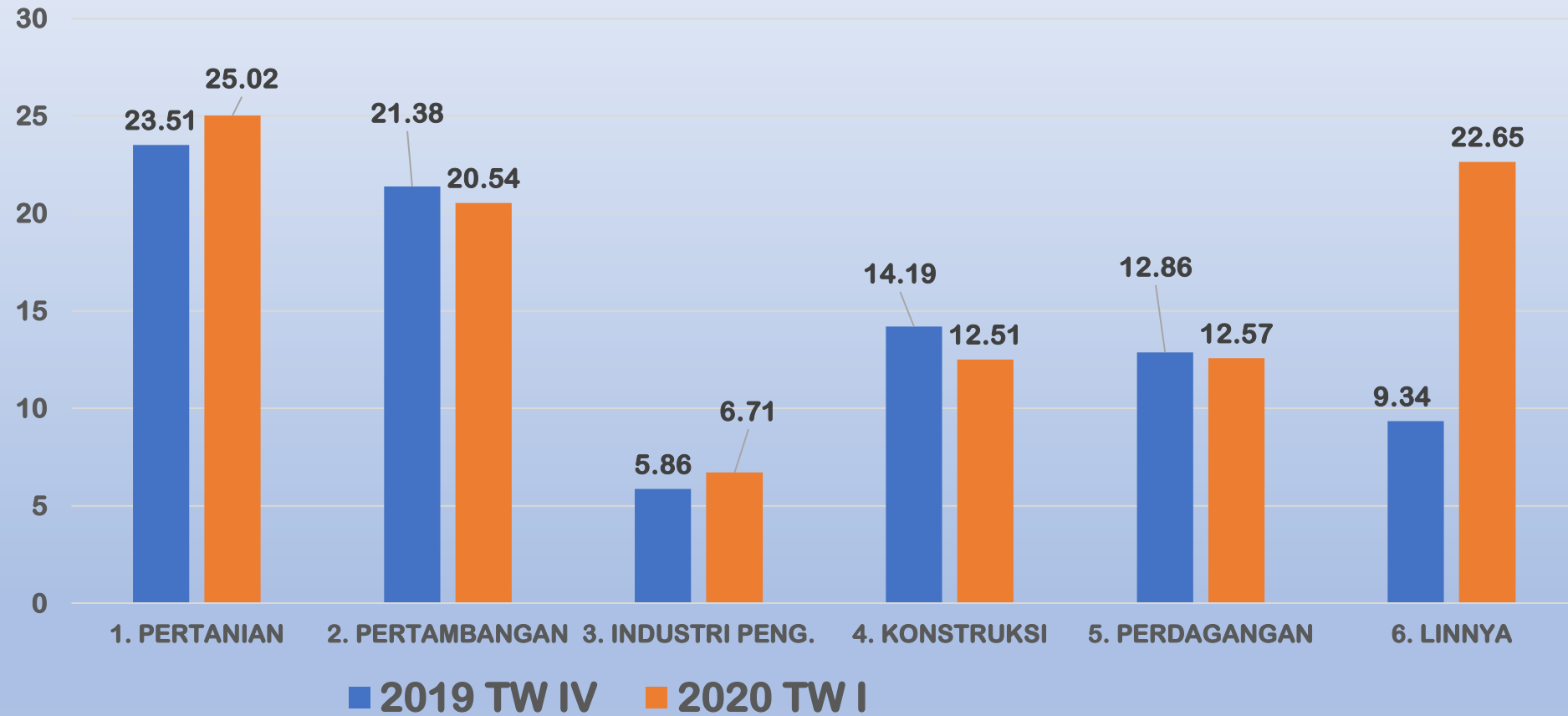
PERTUMBUHAN EKONOMI



KONTRIBUSI PDRB MENURUT SEKTOR

SEKTOR	2019 TW IV	2020 TW I
1. PERTANIAN	23.51	25.02
2. PERTAMBANGAN	21.38	20.54
3. INDUSTRI PENG.	5.86	6.71
4. KONSTRUKSI	14.19	12.51
5. PERDAGANGAN	12.86	12.57
6. LINNYA	9.34	22.65
TOTAL	100	100

KONTRIBUSI BDRB MENURUT SEKTOR



PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI TENGGARA DAN INDONESIA TAHUN 2013-2020

NO	TAHUN	PERT. EKONOMI	
		SULTRA	INDONESIA
1	2013	7,50	5,71
2	2014	6,25	5,21
3	2015	6,88	4,99
4	2016	6,51	5,16
5	2017	6,81	5,23
6	2018	6,42	5,31
7	2019	6,51	5,00
8	2020 TW I	4,4	3,00

5/19/2020

Sumber : BPS, Sultra Dalam Angka 2017, 2018

PENGANGGURAN SULAWESI TENGGARA DAN INDONESIA TAHUN 2013-2020

NO	TAHUN	PENGANGGURAN	
		SULTRA	INDONESIA
1	2013	4,46	6,17
2	2014	4,43	5,94
3	2015	5,55	6,18
4	2016	2,72	5,61
5	2017	3,30	5,50
6	2018	3,26	5,34
7	2019	3,59	5,01
8	2020 FEBRUARI	3,17	4,99

5/19/2020

Sumber : BPS, Sultra Dalam Angka 2017, 2020

**PENDUDUK MISKIN SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2013-2018**

NO	TAHUN	PENDUDUK MISKIN	
		SULTRA	INDONESIA
1	2013	13,73	11,46
2	2014	12,77	10,96
3	2015	13,74	11,13
4	2016	12,88	10,86
5	2017	12,81	10,64
6	2018	11,63	9,82
7	2019	11,24	9,29

Sumber : BPS, Sultra Dalam Angka 2017, 2018

STRUKTUR PDRB MENURUT PENGELUARAN

NO	KOMPONEN	2019		2020
		TW I	TW IV	TW I
1	PK. RUMAH TANGGA	50.3	47.58	50.82
2	PK. PEMERINTAH	1.01	1.01	1.02
3	PK. LNPRT	12.43	15.56	12.16
4	PMTB	38.64	40.23	37.79
5	PER. INVENTORI	-0.22	-0.51	0.2
6	EKSPOR	25.19	30.59	26.38
7	IMPOR	27.44	34.46	28.37
	PDRB	100	100	100

* Ekspor Besi dan Baja (Nikel) 99,07 %

* Negara Tujuan Tiongkok 89,05 %

Tingkat Inflasi :

- Inflasi Sultra bulan April 0,40 %**
 - Kota Kendari bulan april deflasi 0,05 %**
 - Baubau bulan april inflasi 0,88 %**
- Inflasi Indonesia bulan april 0,08 %**

Ekspor Sultra :

- Volume Ekspor :

- Jan-mar 2019 → 9.243,67 Ribu Ton

- Jan-mar 2020 → 298,47 Ribu Ton

- Nilai Ekspor :

- Jan-mar 2019 → 338,81 juta US\$

- Jan-mar 2020 → 416,62 juta US\$

- Negara Tujuan Tiongkok 89,05 %

- Ekspor besi & baja (nikel) 99,07 %

TENAGA KERJA YANG DIRUMAHKAN DAN DI PHK SEBANYAK 1.060 ORANG DARI 35 PERUSAHAAN:

- DIRUMAHKAN SEBANYAK 1.018 ORANG**
- DI PHK SEBANYAK 42 ORANG**

INDUSTRI PERHOTELAN DAN RUMAH MAKAN:

- KOTA KENDARI 24 PERUSAHAAN : 258 ORANG**
- KOLAKA 1 PERUSAHAAN : 61 ORANG**
- WAKATOBE 11 PERUSAHAAN : 28 ORANG**
- KONAWA UTARA 1 PERUSAHAAN : 11 ORANG**

BERDASRKA LAPORAN PERBANKAN TGL. 15 MEI 2020:

- JUMLAH DEBITUR YANG TERDAMPAK COVID-19
DAN MENGAJUKAN RESTRUKTURISASI
SEBANYAK 41.996 DENGAN OUTSTANDING
KREDIT SEBANYAK Rp. 2,59 T.**
- RESTRUKTURISASI YANG TELAH DISETUJUI
SEBANYAK 15.389 DEBITUR DENGAN
OUTSTANDING KREDIT SEBANYAK Rp. 935.71 M.**

DEBITUR DIBERI KERINGANAN DALAM BENTUK:

- MEMPERPANJANG TENOR/JANGKA WAKTU KREDIT**
- PENERAPAN GRACE PERIOD**
- PENGURANGAN SUKU BUNGA OLEH LEMBAGA
PEMBIAYAAN**
- PENGURANGAN TUNGGAKAN POKOK**
- PENGURANGAN TUNGGAKAN BUNGA**
- PENAMBAHAN FASILITAS KREDIT**
- KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM.**

REKOMENDASI:

- 1. Untuk menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan serta penyediaan lapangan kerja, maka kebijakan pemerintah perlu fokus pada sektor pertanian, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi yang cukup besar pada sector pertanian.**
- 2. UMKM perlu mendapat perhatian dan kebijakan pemerintah, karena di samping dapat menyediakan lapangan kerja, juga dapat menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.**

TERIMA KASIH !!!